



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

POLA TATA KELOLA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah, urusan kesehatan merupakan salah satu bidang Pemerintahan Daerah yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sehingga Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayahnya;
- b. bahwa laboratorium kesehatan daerah sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki peran strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan memberikan pelayanan yang bermutu serta dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
- c. bahwa untuk menjamin keberlangsungan laboratorium kesehatan daerah dan berdasarkan ketentuan Pasal 38 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur pola tata kelola laboratorium kesehatan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa sebagaimana pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah di Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Batang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Batang.
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
8. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Labkesda adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan yang bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.

9. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan UPTD Labkesda untuk periode 5 (lima) tahunan.
10. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran Labkesda.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Labkesda yang selanjutnya disingkat DPA-Labkesda adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Labkesda.
12. Jabatan Fungsional adalah jabatan fungsional di UPTD Labkesda.
13. Dewan Pengawas UPTD Labkesda yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan UPTD Labkesda.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi UPTD Labkesda dalam melaksanakan dan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan yang optimal.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini untuk:
 - a. mewujudkan kerja sama yang baik dan harmonis antara Pemerintah Daerah sebagai pemilik, unsur pejabat dan pegawai pada Labkesda sehingga tercipta tata kelola korporasi yang baik (*good corporate governance*); dan
 - b. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, profesionalisme dan tanggung jawab sehingga pelayanan yang diberikan oleh Labkesda dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak serta dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah sebagai pemilik.

BAB II KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Pejabat Pengelola

Pasal 3 (Pasal 3 Permendagri 79/2018)

- (1) UPTD Labkesda terdiri atas:
 - a. pejabat pengelola; dan
 - b. pegawai.
- (2) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan UPTD Labkesda dalam pemberian layanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja UPTD Labkesda.
- (4) Pejabat pengelola dan pegawai UPTD Labkesda berasal dari:
 - a. pegawai negeri sipil; dan/atau
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (5) UPTD Labkesda dapat mengangkat pejabat pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari profesional lainnya.
- (6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan kebutuhan profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (7) Pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (8) Pejabat pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud ayat (5) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (9) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (10) Pengadaan pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban, dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

(Pasal 5 Permendagri 79/2018)

- (1) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan pejabat pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (3) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan, dan berdaya saing.

Bagian Kedua Kedudukan

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

(Pasal 6+7 Permendagri 79/2018)

- (1) Pejabat pengelola UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pemimpin
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (2) Pejabat pengelola UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Pemimpin UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala UPTD Labkesda yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

- (4) Pejabat keuangan dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c bertanggungjawab kepada pemimpin.

Paragraf 2
Pemimpin

Pasal 6
(Pasal 8 Permendagri 79/2018)

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a bertugas:
- memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan UPTD Labkesda agar lebih efisien dan produktivitas;
 - merumuskan penetapan kebijakan teknis UPTD Labkesda serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - menyusun Renstra;
 - menyiapkan RBA;
 - mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan UPTD Labkesda selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan UPTD Labkesda yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan UPTD Labkesda kepada Bupati; dan
 - tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional keuangan.

Pasal 7
(Pasal 9 Permendagri 79/2018)

- (1) Pemimpin bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (2) Dalam hal pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari pegawai negeri sipil, pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Paragraf 2
Pejabat Keuangan

Pasal 8
(Pasal 10+Mulok Permendagri 79/2018)

- (1) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dijabat oleh kepala subbagian tata usaha.
- (2) Pejabat keuangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) bertugas:
- merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - menyiapkan DPA;
 - melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;

- g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan system informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.
 - (4) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
 - (5) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.

Paragraf 3
Pejabat Teknis

Pasal 9
(Pasal 11+Mulok Permendagri 79/2018)

- (1) Pejabat yeknis UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dijabat oleh Pejabat Fungsional.
- (2) Pejabat teknis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (4) Pelakssaaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksudpada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

Bagian Ketiga
Pembina dan Pengawas UPTD

Paragraf 1
Umum

Pasal 10
(Pasal 12 Permendagri 79/2018)

Pembina dan pengawas UPTD Labkesda terdiri atas:

- a. pembina teknis dan pembina keuangan;
- b. satuan pengawas internal; dan
- c. Dewan Pengawas.

Paragraf 2
Pembina Teknis dan Pembina Keuangan

Pasal 11
(Pasal 13 Permendagri 79/2018)

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a yaitu Kepala Dinas.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a yaitu PPKD.
- (3) Pembina teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu tim teknis.
- (4) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu tim teknis.

Paragraf 3
Satuan Pengawas Internal

Pasal 12
(Pasal 14 Permendagri 79/2018)

- (1) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dapat dibentuk oleh pemimpin untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah pemimpin.
- (3) Pembentukan satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 13
(Pasal 15 Permendagri 79/2018)

- (1) Tugas satuan pengawas internal, membantu manajemen untuk:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai satuan pengawas internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan UPTD Labkesda;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi UPTD Labkesda;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada UPTD Labkesda;
 - f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

Paragraf 3
Dewan Pengawas

Pasal 14
(Pasal 16 Permendagri 79/2018)

- (1) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dapat dibentuk oleh Bupati.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh UPTD Labkesda yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh pejabat pengelola.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk UPTD yang memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (6) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk UPTD yang memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Pasal 15
(Pasal 17 Permendagri 79/2018)

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) terdiri atas unsur:
 - a. 1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi kegiatan UPTD;
 - b. 1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan UPTD.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) terdiri atas unsur:
 - a. 2 (dua) orang pejabat SKPD yang membidangi kegiatan UPTD;
 - b. 2 (dua) orang pejabat SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan UPTD.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan UPTD.
- (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) UPTD.
- (5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah pejabat pengelola diangkat.

- (6) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan UPTD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi UPTD;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Penganvas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/ atau calon anggota legislatif.

Pasal 16

(Pasal 18 Permendagri 79/2018)

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
- a. memantau perkembangan kegiatan UPTD Labkesda;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan UPTD Labkesda dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola UPTD Labkesda;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. membenkan nasihat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai:
 1. RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan UPTD Labkesda; dan
 3. kinerja UPTD Labkesda.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja nonkeuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 17

(Pasal 19 Permendagri 79/2018)

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan UPTD Labkesda;
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; dan
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada UPTD Labkesda, negara, dan/ atau daerah.

Pasal 18

(Pasal 20 Permendagri 79/2018)

- (1) Bupati dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan pengawas.

Pasal 19

(Pasal 21 Permendagri 79/2018)

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada UPTD Labkesda dan dimuat dalam RBA.

Pasal 20

(Pasal 22 Permendagri 79/2018)

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap UPTD Labkesda oleh pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V

PROSEDUR KERJA

(Mulok)

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan unit pelayanan di lingkungan UPTD Labkesda menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, sinkronisasi dan mekanisasi di dalam lingkungannya.

Pasal 22

Pimpinan unit pelayanan di lingkungan UPTD Labkesda mengawasi bawahan dan apabila terjadi penyimpangan untuk mengambil langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pimpinan di lingkungan UPTD Labkesda bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinir bawahannya serta memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 24

Pimpinan di lingkungan UPTD Labkesda mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

Pasal 25

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari staf, diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan dan memberikan petunjuk kepada staf.

Pasal 26

Pemimpin menyusun rencana strategi program dan menyampaikan laporan berkala kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan dan upaya untuk kemandirian UPTD Labkesda, maka pimpinan perlu melakukan pembinaan dan pengawasan serta melaksanakan rapat secara berkala.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan kegiatan harus didasarkan pada standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh pemimpin;
- (2) Prinsip standar operasional prosedur harus jelas, mengutamakan kepentingan dan keselamatan pelanggan, konsisten sesuai dengan falsafah tujuannya, jelas pelaksana dan tanggungjawabnya serta harus dapat dievaluasi.

BAB VI PENGELOMPOKAN FUNGSI (Mulok)

Bagian Kesatu Fungsi Pelayanan

Pasal 29

- (1) Fungsi pelayanan UPTD Labkesda meliputi:
 - a. upaya kesehatan perseorangan; dan
 - b. upaya kesehatan masyarakat.
- (2) Upaya kesehatan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
 - a. pelayanan pemeriksaan haji;
 - b. pelayanan *medical check up*; dan
 - c. pelayanan pemeriksaan bagi Prolanis.
- (3) Upaya kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk

menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat, disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja dan potensi sumber daya yang tersedia di Labkesda.

Bagian Kedua Fungsi Pendukung

Paragraf 1 Administrasi, Umum, dan Keuangan

Pasal 30

- (1) Unsur pendukung meliputi:
 - a. administrasi,
 - b. umum; dan
 - c. keuangan.
- (2) Unsur administrasi, umum dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur organisasi di bidang pelayanan administrasi, umum dan keuangan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pemimpin;
- (3) Unsur administrasi, umum dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melaksanakan administrasi umum dan keuangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), unsur administrasi umum dan keuangan menyelenggarakan fungsi pengelolaan:
 - a. ketatausahaan;
 - b. kerumahtanggaan;
 - c. pelayanan hukum dan kemitraan;
 - d. pemasaran;
 - e. kehumasan;
 - f. pencatatan, pelaporan dan evaluasi;
 - g. penelitian dan pengembangan;
 - h. sumber daya manusia; dan
 - i. pendidikan dan pelatihan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), unsur administrasi umum dan keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan anggaran;
 - b. perbendaharaan dan mobilisasi dana; dan
 - c. akuntansi.

Paragraf 2 Pengelolaan Limbah

Pasal 31

- (1) Pemimpin menunjuk pejabat untuk mengelola limbah medis dan non medis.
- (2) Pengelolaan limbah medis dan non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan yang berorientasi kepada keamanan, kenyamanan, kebersihan, kerapian, keindahan dan keselamatan.
- (3) Pejabat pengelola limbah medis dan non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas antara lain:
 - a. pengelolaan limbah dan sampah;
 - b. pengawasan dan pengendalian vektor/serangga;
 - c. sistem pengelolaan lingkungan fisik dan biologi; dan

- d. menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian/pengembangan di bidang penyehatan lingkungan UPTD Labkesda.
- (4) Fungsi pengelolaan limbah medis dan non medis antara lain:
- a. penyehatan ruang dan bangunan UPTD Labkesda;
 - b. penyehatan makanan dan minuman;
 - c. penyehatan air bersih dan air minum;
 - d. pemantauan pengelolaan linen;
 - e. pengelolaan sampah;
 - f. pengendalian serangga dan binatang pengganggu;
 - g. desinfeksi dan sterilisasi ruang;
 - h. pengelolaan air limbah; dan
 - i. upaya penyuluhan kesehatan lingkungan.

BAB VII
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
(Mulok)

Pasal 32

- (1) Sumber daya manusia UPTD Labkesda terdiri atas:
- a. aparatur sipil negara; dan
 - b. non aparatur sipil negara.
- (2) Aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. pegawai negeri sipil; dan
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
- (3) Non aparatur sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tenaga profesional.
- (4) Tenaga professional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. tenaga kesehatan; dan
 - b. tenaga non kesehatan.
- (5) Jenis dan jumlah Tenaga Kesehatan dan Tenaga non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung berdasarkan analisis beban kerja.
- (6) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling sedikit terdiri atas:
- a. dokter umum;
 - b. dokter spesialis patologi klinik;
 - c. tenaga ahli teknologi laboratorium medik ;
 - d. tenaga sanitarian;
 - e. tenaga kesehatan masyarakat;
 - f. tenaga perawat; dan
 - g. perekam medik;
- (7) Tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b paling sedikit terdiri atas:
- a. tenaga administrasi;
 - b. pengemudi;
 - c. petugas kebersihan;
 - d. tenaga sistem informatika; dan
 - e. petugas keamanan.

Pasal 33

Aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 34

Non aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerjanya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal

BUPATI BATANG,

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

LANI DWI REJEKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2022 NOMOR